

TANTANGAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DASAR INKLUSI DI KABUPATEN BANYUMAS

CHALLENGES OF IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE BASIC EDUCATION IN BANYUMAS DISTRICT

Muslih Faozanudin¹, Lilis Sri Sulistian²

^{1,2} Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

muslih.faozanudin@unsoed.ac.id, lilis.sulustiani@unsoed.ac.id

ABSTRACT

Inclusive education as a program and policy requires a strong commitment from stakeholders, especially the government. This policy should continue to roll in line with the increasing demands of society for services in the field of special education. The existence of inclusive schools is an effort by the government to expand the reach of educational services, especially for children with disabilities, it's just that the level of ABK that is still able to be accepted is mild. The declaration of Banyumas Regency to organize inclusive education in inclusive schools is an effort to fulfill these demands and tasks, however, its implementation has not been able to fulfill what the community expects from the hundreds of schools that are declared ready to organize inclusive schools. There are only a few schools that consistently accept ABK students. While the rest are not sustainably received and implemented. This research was conducted using a qualitative approach, which was aimed at obtaining more in-depth information about the problems and challenges faced in the implementation of inclusive education and schools in the Banyumas district. The research concluded that there are at least four challenges that must be faced in implementing inclusive education, namely; the diversity of ABK students that must be handled; limited human resources, especially special assistant teachers (GPK); Limitations of inclusive learning facilities and infrastructure and the need for innovation and curriculum modification. The condition of ABK students whose abilities vary demands special treatment that is not necessarily the same as regular students

Keywords: *Children With Special Needs, Special Accompanying Teachers, Inclusive Schools*

ABSTRAK

Pendidikan inklusi sebagai sebuah program dan kebijakan menuntut adanya komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah. Kebijakan tersebut seharusnya terus bergulir seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang Pendidikan khusus. Keberadaan sekolah inklusi merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan khususnya kepada anak-anak penyandang disabilitas, hanya saja tingkat ABK yang masih mampu untuk diterima adalah yang ringan. Pencanaan Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pendidikan inklusi pada sekolah inklusi merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan dan tugas tersebut, namun demikian pelaksanaannya belum mampu memenuhi apa yang diharapkan masyarakat dari sebanyak ratusan jumlah sekolah yang dinyatakan siap menyelenggarakan Sekolah inklusi dalam realitasnya hanya ada beberapa Sekolah saja yang secara konsisten menerima siswa ABK. Sedangkan selebihnya tidak secara keberlanjutan menerima dan menyelenggarakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Sekolah inklusi di kabupaten Banyumas. Penelitian menyimpulkan bahwa, paling tidak terdapat empat tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi, yaitu; adanya keberagaman siswa ABK yang harus ditangani; keterbatasan sumber daya manusia terutama guru pendamping khusus (GPK); Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran Inklusi dan perlunya inovasi dan modifikasi kurikulum. Kondisi siswa ABK yang bermacam-macam kemampuannya menuntut adanya perlakuan khusus yang tidak serta merta disamakan dengan siswa regular.

Kata kunci: *Anak Berkebutuhan Khusus, Guru Pendamping Khusus, Sekolah Inklusi*

Submitted	Accepted	Published
March 8 th 2023	March 19 th 2023	March 25 th 2023

PENDAHULUAN

Gagasan pendidikan inklusi telah secara bertahap mengubah kebijakan pendidikan dan sistem pembelajaran di sekolah dan bahkan telah menjadi panduan menyeluruh bagi organisasi sekolah umum dan pengajaran di kelas (Tsang dan Cheng 2017). Konsep ini juga telah banyak diteliti oleh para pemerhati dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, pedagogi, dan pendidikan dengan upaya menyelaraskan dan menghargai keragaman di sekolah saat ini (Sánchez-Teruel dan Robles-Bello 2013, Echeita dan Ainscow 2011; Muntaner, Rosselló, dan de la Iglesia 2016). Dalam bidang kebijakan, konsep ini telah banyak dilakukan untuk mengakomodasikan hak inklusi bagi semua peserta didik dengan melibatkan semua stakeholder (UNESCO 2008), yaitu untuk menjawab dan merespon keragaman di antara para peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, baik dalam maupun dari kegiatan pendidikan (Bachri, 2022; Wathoni, 2013), baik dalam setting pendidikan formal maupun non formal. Dan berusaha memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai kesulitan apa pun di kelas pendidikan umum (Nilholm dan Göransson 2017). Bahkan promosi terhadap Pendidikan inklusi menggambarkan suatu proses yang kompleks yang menuntut peran lebih dari para pendidik. (Kovač & Vaala, 2019). Kompleksitas pendidikan inklusi ini disebabkan sistem Pendidikan ini menerapkan sistem pembelajaran dengan memberikan kesempatan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. (Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, pasal 1).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, Ainscow, Booth, dan Dyson (2006) meringkas konseptualisasi yang diberikan untuk pendidikan inklusif dalam enam kategori utama: (a) inklusi berkaitan dengan disabilitas dan 'kebutuhan pendidikan khusus' (b) inklusi sebagai tanggapan terhadap eksklusi disipliner, (c) inklusi sebagai semua kelompok rentan terhadap eksklusi, (d) inklusi sebagai promosi sekolah untuk semua, (e) inklusi sebagai 'Pendidikan untuk Semua', dan (f) inklusi sebagai pendekatan berprinsip untuk pendidikan dan masyarakat. Meskipun kategori-kategori ini tidak eksklusif satu sama lain, mereka mencerminkan posisi utama yang biasanya diambil untuk membahas topik ini (Messiou 2017). Terlepas dari konseptualisasi pendidikan inklusif ini, UNESCO (2008) menjelaskan faktor kunci pendidikan inklusif untuk semua siswa: (a) mendorong partisipasi siswa dan mengurangi eksklusi dari dan untuk pendidikan; (b) kehadiran, partisipasi, dan pencapaian semua siswa, tetapi khususnya mereka yang tersisih atau berisiko terpinggirkan. Secara keseluruhan, pendidikan inklusif adalah masalah mengadopsi pendekatan sosio-ekologis mengenai interaksi antara kemampuan siswa dan tuntutan lingkungan, menekankan bahwa sistem pendidikan harus beradaptasi dan menjangkau semua siswa – dan bukan sebaliknya- (Echeita et al. 2017; Nilholm dan Göransson 2017; Walker et al. 2014). Sarjana lain Muntaner, Rosselló, dan de la Iglesia (2016) menekankan pentingnya mencapai keselarasan antara kebijakan, budaya, dan praktik inklusif, dan menghilangkan hambatan untuk pembelajaran dan partisipasi. Dengan demikian, makna inklusi menekankan tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap semua peserta didik dalam suatu system pendidikan, baik terhadap siswa yang normal maupun yang difable. Sehingga sistem pembelajaran mampu membuat anak berkebutuhan khusus tidak termarginalkan dan mampu membuat mereka mengembangkan potensinya. Disamping itu terdapat pandangan bahwa pendidikan inklusi adalah hak asasi semua manusia yang dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa sosial pada anak normal terhadap anak berkebutuhan khusus (Peters, 2003; Maulida, 2019; Fayaz, 2019)

Dilapangan, konsep pendidikan inklusif yang ideal belum mampu untuk diterapkan seluruhnya. Banyak sekolah dan institusi pendidikan yang masih kesulitan dan belum mampu mengimplimentasikan program tersebut. (Nurvitasari, Azizah, & Sunarno, 2018). Sekolah harus siap menerima anak berkebutuhan khusus, yang memiliki karakter spesial dan memerlukan pendampingan untuk membantu agar dapat mengembangkan ketrampilannya (Ilahi, 2013). Kondisi ini juga terjadi

di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan pendidikan inklusi pada jenjang Pendidikan SD dan SMP belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Deklarasi bahwa Kabupaten Banyumas sebagai salah satu penyelenggara pendidikan inklusi sejak pada tahun 2016 pun dilaksanakan. Tabel 1, menggambarkan klaim yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas mengenai penyelenggara Sekolah inklusi beserta Guru Pendampingnya (GPK)

Tabel 1. Jumlah Sekolah penyelenggaran Pendidikan Inklusi dan GPK di Kabupaten Banyumas

No	Jenjang Pendidikan	2016		2021	
		Jml Sekolah	Jumlah GPK	Jumlah Sekolah	Jumlah GPK
1	TK/PUD	29	180	36	126
2	SD/MI	331	126	540	418
3	SMP/MTs	42	3	42	42
4	SMA/K	0	0	3	
5	SLB	4		4	
Jumlah			1344	623	1226

Sumber: berbagai sumber, diolah

Dari table 1 terlihat banyaknya sekolah di Kabupaten Banyumas yang telah ditujuk untuk menyelenggarakan sekolah inklusi. Namun demikian seiring dengan perjalanan waktu, program tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam implementasi, pendidikan inklusi tidak semudah dengan apa yang dicanangkan. Disamping karena keragaman jenis anak yang ABK, dimana setiap anak ABK tidak dapat disamakan, karena kondisi ABK beragam. Sehingga dari sekina banyak sekolah regular yang telah ditunjuk sebagai sekolah inklusi, hanya 5 SD Negeri yang memiliki kelengkapan untuk pendidikan inklusi cukup memadai, diantaranya adalah SD 5 Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, SDN 1 Tanjung, Kecamatan Purwokerto Barat dan SDN 1 Kalijaran, Kecamatan Sumbang Banyumas.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan hambatan implementasi pendidikan inklusi pada jenjang Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyumas. kajian ini penting untuk dilakukan, karena setiap kebijakan/program harus disertai dengan dukungan sumber daya yang memadai. Dukungan semuan pihak, baik dari Pemerintah sebagai penagnggung jawab, Sekolah sebagai pelaksana di lapangan dan masyarakat sebagai pengguna yang memiliki beragam kepentingan, harus dapat dijlankan. Sedikitnya jumlah sekolah yang siap dengan segala sumber daya yang dibutuhkan menggamabrkan bahwa masih banyak persoalan yang perlu diangkat dalam Penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi program pendidikan inklusi dan tantanginya. Pendekatan ini menuntut peneliti memiliki ketrampilan, yang memadai, dan kemampuan pengamatan secara cermat dan kecakapan berinteraksi (Strauss & Corbin, 2003). Untuk memperoleh data sesuai dengan topik penelitian, informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih informan sebagai sumber informasi yang terpercaya. Informan tersebut meliputi: pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelola sekolah inklusi, yang meliputi manajemen sekolah, komite sekolah dan masyarakat, Pejabat terkait pada tingkat Kecamatan dan Dinas pendidikan Kabupaten. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, situs penelitian dipilih institusi Sekolah Dasar Negeri reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, yaitu SDN 5 Aracawinangun, SDN1 Tanjung dan SDN 1

Watujaran. Pemilihan Situs ini karena SDN merupakan sekolah di bawah naungan pemerintah kabupaten dan berkewajiban untuk melaksanakan mandatori tersebut.

Data diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu penggalian informasi dengan melakukan wawancara individu secara intensif dengan sejumlah kecil responden untuk mengeksplorasi perspektif mereka tentang ide, program, atau situasi tertentu (Boyce & Neale, 2006) dengan menfokuskan pada permasalahan pelaksanaan pendidikan inklusi pada sekolah terpilih.

Desain analisis menggunakan format deskriptif-kualitatif, yang ditujukan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi atau karena gejala-gejala tidak memungkinkan diukur secara tepat (Garna, 1999:32; Bungin, 2013:146). Berdasarkan desain tersebut, data dibangun dari hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Analisis data penelitian menggunakan langkah-langkah analisis model interaktif oleh Miles, Huberman & Saldana (2014:14), yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Kabupaten Banyumas

Pendidikan inklusi di Kabupaten Banyumas merupakan pelaksanaan atas instruksi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, pasal 4, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik. Oleh karena itu pemerintah daerah menjadi kunci dalam peningkatan akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) baik yang diselenggarakan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun Sekolah inklusi (Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 2019). Sampai dengan tahun 2021 pendidikan inklusi di Kabupaten Banyumas masih tetap berjalan, namun dari sejumlah Sekolah yang telah ditunjuk dan dinyatakan layak untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi hanya ada 5 SD yang secara konsisten menerima siswa ABK. Kelima SD Negeri tersebut, dianggap masih layak dan memenuhi standar dalam pelaksanaan Pendidikan inklusi.

Terdapat beberapa alasan mengapa hanya 5 SDN yang tetap konsisten dan berlanjut menerima Siswa ABK. *Pertama*, Pendidikan inklusi menerima semua siswa dengan berberapa ABK. Sesuai dengan kebijakan yang ada, Jenis ABK yang dapat dilayani adalah yang masih dalam tahap ringan. Dengan keberagaman jenis ABK tersebut, bagi Sekolah regular bukan lah suatu yang mudah untuk menyelenggarakan. Oleh karena itu *Kedua*, penyelenggaraan Pendidikan inklusi membutuhkan sumber daya yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan Pendidikan regular. Masing-masing ABK tentunya memerlukan penanganan dan perhatian yang lebih spesifik, tidak dapat diperlakukan sama dengan anak-anak yang normal, oleh karena itu dibutuhkan GPK yang memadai, sementara di sisi lain, Pemerintah sedang dalam kondisi masih kurang berpihak kepada pengadaan tenaga pendidik. *Ketiga*, diperlukan alat bantu belajar yang berbeda dengan anak-anak yang normal. Keberagaman kondisi ABK juga membutuhkan jenis alat peraga yang berbeda-beda. Sementara di sisi lain, pengadaan peralatan untuk Sekolah masih mengalami hambatan. *Keempat* adalah masalah jenis kurikulum yang tentu saja tidak sama persis dengan kurikulum untuk anak-anak yang normal. Empat alasan tersebut menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi yang akan dijelaskan pada bagian lebih lanjut.

Tantangan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Di Kabupaten Banyumas.

Pendidikan inklusif bertujuan dapat memungkinkan guru dan siswa untuk merasa nyaman dengan keragaman dan melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar (Sastradiharja et al., 2020). Pendidikan Inklusi merupakan suatu sistem yang hanya dapat diterapkan ketika semua warga sekolah memahami dan menyadari bahwa peserta didik memiliki perbedaan kemampuan dan potensi (Bachri, 2022). Penyelenggaraannya tentu tidak mudah dan banyak tantangan yang perlu dihadapi, karena adanya keterbatasan yang dimiliki. Berikut ini beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Banyumas, yang dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu; (1) Keberagaman Siswa dan Tantangan Pendidikan Inklusi, (2) Keterbatasan sumber daya manusia sebagai GPK dan peralatan pembelajaran, (3). Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran Inklusi, (4). kurikulum pendidikan inklusi.

1). Keberagaman Siswa dan Tantangan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang berusaha mengakomodasi segala jenis perbedaan dari peserta didik, sehingga pendidikan inklusif memiliki karakter akomodatif, dengan menerima setiap siswa dan menghindari labeling negatif, serta dalam operasionalnya melibatkan pihak-pihak terkait secara aktif (Agustin, 2017). Keberagaman kemampuan yang melekat pada diri anak didik, termasuk kondisi peserta didik yang dikategorikan ABK merupakan hal yang harus dilaksanakan pada Sekolah inklusi. Kondisi ini tentu saja menjadi tantang tersendiri dalam penyelenggaraan Pendidikan, karena sekolah dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dalam suasana yang normal. Karena secara konseptual, setiap ABK memiliki ciri khas dengan kemampuan yang khas pula. Tabel 2 di bawah ini, gambaran tentang kondisi ABK yang ada di dua SD negeri tempat Penelitian,

Tabel 2: Jenis ABK pada SDN 5 Arcawinangun, SD N1 Tanjung dan SDN 1 Watujaran. Tahun 2021

No	Jenis ABK	SDN 5 Arcawinangun	SDN1 Tanjung	Jumlah ABK
1	Retardasi Mental Tuna Grahita)	V	V	V
2	Lamban Belajar	V	V	V
3	Tunadaksa	V	V	V
4	Downsyndrom	V	V	
5	ADHD* (Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder)	V	V	-
6	Borderline Personality Disorder (BPD)	V	-	-
7	Gangguan emosional	V	V	

Sumber: diolah dari SDN 5 Arcawinangun,, SDN 1 Tanjung dan SD 1 Watujaran, 2021

Dengan melihat heterogenitas jenis siswa yang masuk kateogri ABK seperti di atas dapat bayangkan bagaimana sekolah regular dengan keterbatasan yang ada mampu untuk melaksanakan fungsi pembelajaran secara normal. Memang upaya memasukkan anak-anak ABK kedalam sistem pendidikan yang normal merupakan upaya untuk memberikan hak yang sama kepada semua warga negara mengenyam Pendidikan (Permediknas nomor 9 tahun 2009). Hal ini sejalan dengan hak yang dijamin untuk para penyandang disabilitas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 54 tahun 1997 tentang Penyandang cacat, Pasal 4(1) yang menyatakan bahwa ‘‘aksesibilitas’ adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan’’. Dari konsep tersebut Selanjutnya Rahayu dkk (2013) menerjemahkan kedalam 4 azas yang menjamin kemudahan atau aksesibiliats bagi para penyandang difabel, yang didalamnya adalah ABK yaitu azas kemudahan; azas kegunaan, azas keselamatan dan azas kemandirian. Dengan demikian, Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus menjamin terhadap keempat azas tersebut. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi.

Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2019 tentang

penerimaan siswa baru SD pasal 13(6), menjadi tantangan bagi Sekolah Negeri, dalam penerimaan Siswa baru. Dimana Sekolah tidak boleh menolak pendaftaran siswa baru yang memiliki kriteria ABK sebagai berikut: mempunyai kelainan tunanetra / tunarungu / tunawicara / tunagrahita/tunadaksa/ tunalaras/berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/ menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/ memiliki kelainan lainnya/tunaganda. Pihak sekolah wajib untuk memfasilitasi dan menerima terhadap calon siswa apabila mendaftar untuk ikut dalam Pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah reguler sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi. Namun demikian, frasa ‘sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi’ sertinya menjadi kelauman dalam proses pelaksanaan program ini, karena dapat ditafsirkan secara multi-interpretatif, yang dapat menjadi permakluman bagi Pemerintah Kabupaten dan Sekolah, untuk tidak menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi semua Sekolah. Pemerintah akhirnya hanya memilih dan melokalisir beberapa sekolah tertentu yang dapat menyelenggarakan pendidikan ini.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia sebagai GPK dan Peralatan Pembelajaran

Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat strategis bagi kelangsungan kehidupan organisasi, termasuk bagi organisasi publik seperti lembaga pendidikan (Horton, et,all, 2003:23; Lusthaus, et.all, 2002:52; Gogin, et. all, 1990:128; Kumorotomo dan Widianingrum, 2010:1). Demikian pula Pendidikan inklusi membutuhkan sumber daya manusia yang kretatif dan inovatif serta kesabaran, karena yang dihadapi adalah ABK dengan beragam kondisi.Oleh karena itu Pendidikan inklusi perlu didukung dengan tenag-tenaga GPK yang memiliki ketrampilan dan keahlian khusus. terutama dalam proses pembelajarn (Zakia, 2015)

Menjadi GPK bukalah suatu pekerjaan yang ringan, karena berhadapan dengan ABK yang memiliki karakteristik yang beragam. Ada beberapa tugas pokok GPK yang perlu untuk dicermati, adalah: 1) membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar inter tenaga Pendidikan dan kependidikan, serta masyarakat; 2) membangun jejaring kerja antar Lembaga; 3) melaksanakan bedah kasus; Menyusun instrumen asesmen akademik dan nonakademik; 4) menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik; 5) Menyusun program layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus; 6) melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus; 7) memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berupa remedial maupun pengayaan; 8) melaksanakan pembelajaran khususdi ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan; 9) melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik; 10) memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus (Rajab, 2018).

Pemenuhan tenaga GPK yang memiliki latar belakang pendidikan khusus merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan inklusi. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 10 tentang pendidikan inklusi menyatakan bahwa guru pembimbing khusus (GPK) yang berada di sekolah pendidikan inklusi paling sedikit 1 orang guru. Memang belum ada peraturan yang secara khusus mengatur berapa rasio peserta didik berkebutuhan khusus dan GPK yang seharusnya. Bila disandingkan dengan Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana, tertulis bahwa kapasitas maksimum untuk ruang kelas SDLB untuk 5 peserta didik. Ketentuan tersebut tentu tidak serta merta dapat digunakan untuk acuan standar bagi pelaksanaan Pendidikan inklusi di Sekolah reguler. Ketika Rizqianti, dkk, (2022) menyimpulkan bahwa bahwa rasio guru GPK dengan Murid ABK dengan rasio 1 dibanding 5, maka untuk sekolah reguler yang menjalankan Pendidikan inklusi kurang rasional, karena sekolah reguler berbeda dengan SDLB. Permasalahan tersebut di atas, memiliki karakteristik yang sama dengan pelaksanaan program

pendidikan inklusi di Kabupaten Banyumas, yaitu belum semua sekolah inklusi memiliki GPK yang cakap dalam menangani dan membimbing ABK. Para GPK bukan berasal dari latar belakang Pendidikan yang khusus, melainkan diambil dari guru regular yang diberi pelatihan khusus tentang Pendidikan inklusi. Hal ini diiyakan oleh salah satu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, bahwa: "untuk kualifikasi GPK tidak punya, sebagian besar dari mereka guru GPK merupakan guru regular yang merangkap sebagai GPK". Minimnya jumlah GPK yang berasal dari pendidikan sekolah luar biasa ini menyebabkan mereka harus berbagi tugas untuk bisa menangani siswa berkebutuhan khusus tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan terkait dengan bagaimana beratnya menjalankan tugas sebagai GPK. Dengan kondisi keterbatasan jumlah guru pembimbing khusus ini merupakan salah satu kendala di sekolah inklusi (Mayasari, 2016; Sulthon, 2019), sehingga dalam pelaksanaannya kurang efisien.

c). Keterbatas Fasilitas Sarana dan Prasarana Pembelajaran Inklusi

Untuk mendukung proses pembelajaran inklusi, dibutuhkan sarana dan prasana pembelajaran yang berbeda dengan anak yang regular atau normal. Perbedaan ini terkait dengan kondisi ABK yang beragam. Permendiknas no 33 tahun 2008 memang telah mengatur tentang Standar sarana dan Prasana untuk Sekolah Luar biasa. Dalam Peraturan tersebut memang untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran SDLB perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan tingkat dan kebutuhan ABK. Pendidikan inklusi, walaupun bukan kategori SDLB, tentunya juga perlu memperhatikan kondisi sarana dan prasarana bagi lancarnya Pendidikan. Hasil Penelitian di lapangan ditemukan bahwa, Sekolah regular yang memiliki kelengkapan untuk Pendidikan inklusi masih sangat terbatas, yaitu hanya pada 5 sekolah yang telah ditujuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, SD 5 Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, SDN 1 Tanjung, Kecamatan Purwokerto Barat dan SDN 1 Kalijaran, Kecamatan Sumbang Banyumas. Namun diantara kelima SDN tersebut yang paling lengkap hanya 2 SD yaitu SDN5 Arcawinangun dan SDN 1 Tanjung. Sementara SD-SD yang lain, walaupun Pemerintah kabupaten telah mencanangkan, kurang mendapat prioritas.

Bagi siswa ABK, untuk fasilitas pembelajaran yang sifatnya umum seperti ruang, perabot dan sarana lainnya adalah sama. Namun yang membedakan adalah tidak semua ABK dapat menggunakan sarana yang biasa digunakan oleh siswa regular, maka perlu disediakan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Peralatan tersebut misalnya berupa media pembelajaran dan peralatan-peralatan khusus sesuai dengan kondisi SBK. Ketentuan tersebut telah dicantumkan dalam oleh Undang-Undang nomor 54 tahun 1997 pasal 4, tentang hak aksesibilitas ABK. Aksesibilitas untuk yang penyandang disabilitas harus memnuhi azas sebagai berikut:

- 1) Asas atas kemudahan beraktivitas, yaitu setiap peratan dan fasilitas yang disediakan oleh ABK menjamin setiap orang menerima kemudahan dalam beraktivitas di ruang publik
- 2) Asas atas kegunaan bangunan, yaitu setiap peralatan dan fasilitas memenuhi fungsi atau kegunaan yang di peruntukan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari hari.
- 3) Asas atas keselamatan, yaitu setiap peralatan yang digunakan oleh ABK menjamin terhadap keselamatan mereka.
- 4) Asas kemandirian bagi disabilitas sendiri yaitu setiap disabilitas harus bisa mencapai suatu tempat tanpa bantuan dari orang lain, sehingga perlu penyediaan alat bantu bagi disabilitas untuk mempermudahnya bergerak atau beraktifitas. (Rahayu, dkk, 2013:)

Keterbatasan fasilitas dan peralatan belajar yang dimiliki oleh Sekolah inklusi menyebabkan proses pembelajaran siswa ABK pada Sekolah inklusi kurang mencapai hasil yang maksimal. Hal ini pun terjadi pada sekolah-sekolah yang telah dideklarasikan sebagai sekolah inklusi oleh Pemerintah

Kabupaten. Disatu sisi Sekolah tersebut mendapat mandat dari Pemerintah kabupaten untuk menyeleggarakan sekolah inklusi, disisi lain masih kurangnya perhatian yang serius dari pihak Pemerintah dalam melengkapi fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembelajaran Sekolah inklusi. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Sekolah dan juga Pemerintah daerah dalam upaya melayani masyarakat yang membutuhkan Pendidikan inklusi.

d). Kurikulum Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan regular, bukan hanya pada GPK, sarana dan prasarana, dan media pembelajaran, tetapi juga kurikulumnya. Perbedaan kemampuan dari peserta didik dari kelompok ABK dengan kelompok regular menjadi tantangan tersendiri khususnya terkait dengan materi dan muatan dalam kurikulumnya. Sesuai dengan kondisi yang disandang oleh siswa, maka tidak semua materi dalam kurikulum regular dapat diberikan kepada siswa ABK. Dalam sistem pembelajarannya, semua siswa yang masuk kategori ABK semesetinya mendapatkan pendidikan yang dirancang secara khusus atau *specially designed instruction* (SDI). SDI dibuat untuk memenuhi kebutuhan individual siswa penyandang disabilitas, sehingga kurikulum pun semesetinya di buat berbeda dengan system pendidikan regular, atau dengan membuat *model blendid*, dalam penyusunan kurikulumnya. Pembelajaran dengan kurikulum khusus ini tidak hanya menyinggung masalah keterampilan komunikasi, tentang perilaku, keterampilan interaksi sosial, keterampilan vokasi atau fungsional, atau ranah apapun yang sekiranya terkena dampak dari kondisi disabilitas (Tarnoto, 2016).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implmentasi kurikulum kelas inklusif di SDN 1 Tanjungdan SDN 5 Arcawainangun menerapkan kurikulum modifikasi individu, namun tetap mendasarkan pada kisi-kisi kurikulum Pendidikan regular. Yang dimaksud dengan modifikasi individu adalah kurikulum pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan individual siswa ABK. Siswa dengan ABK yang berbeda, maka akan disusun kurikulum dengan muatan dan materi yang berbeda. GPK harus merancang materi dan muatan yang sesuai dengan kondisi ABK. Dalam system Pendidikan inklusi, dokumen kurikulum ini disebut dengan istilah PPI (Program Pembelajaran Individu). Di bawah ini kutipan hasil wawancara dengan manajer Inklusif pada SDN 1 Tanjung:

“Kurikulum untuk siswa ABK tetap mengacu pada kurikulum pada kelas regular, untuk menyesuaikan dengan kemampuan ABK selanjutnya dimodifikasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi tersebut cenderung pada upaya memyederhanakan materi agar ABK dapat mengikuti pembelajaran dan tidak kesulitan memahami materinya. Model pembelajaran untuk siswa ABK lebih diarahkan kepada bina diri (praktek langsung)melatih motorik siswa.. Tujuannya agar mere lebih mandiri dan lebih paham dengan sesuatu yang nyata”

Konsekwensi bagi GPK adalah harus mampu membuat perangkat pembelajaran yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi ABK. Karena sifatnya individual, maka kurikulum dan pembelajarannya sulit untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ada pelatihan secara khusus diberikan kepada para GPK. Hasil penelitian dari Edward dan Kesiyati (2018) menyatakan bahwa pelatihan GPK akan sangat membantu guru memahami tentang proses penyusunan perangkat pembelajaran, sehingga guru kelas dalam pembelajaran inklusi dapat berjerasi menyesuaikan dengan kebutuhan ABK. Pelatihan yang diberikan harus mampu mendorong GPK untuk berinovasi dalam proses penyempian pembelajaran

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum untuk inklusi merupakan kurikulum regular yang dimodifikasi disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik ABK. Oleh karena itu, pelatihan bagi GPK tentang inovasi pembelajaran dalam Pendidikan inklusi sangat diperlukan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, juga diperleh informasi bahwa kurikulum untuk siswa ABK ternyata lebih pragmatis dan diarahkan pada kemampuan aspek psikomotorik dan skill, atau ketrampilan vokasional. Menurut Iswari (2007), tujuannya adalah mempersiapkan masa depan agar dapat bekerja dan menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri dengan cara meningkatkan kemampuan sesuai bakat dan minatnya sehingga muncul jiwa wirausaha, semangat kerja, dan bermanfaat.

Dari keempat tantangan tersebut, apabila dapat dikelola dengan baik akan dapat menuai keberhasilan sesuai dengan yang diinginkan. Namun sebaliknya apabila tidak dapat mengatasinya, akan berubah menjadi hambatan bagi pelaksanaan program pendidikan inklusi itu sendiri. Di lapangan kondisi ini tentu tidak mudah untuk. Oleh karena perlu ada kerja keras dan komitmen dari semua pihak, baik dari pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Pihak pemerintah dan sekolah perlu menerapkan manajemen pendidikan secara lebih baik dalam pendidikan inklusi, yaitu mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan yang meliputi sumber daya manusia (SDM), kurikulum, atau sumber belajar dan fasilitas lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan secara sesuai dengan yang telah disepakati (Marlia, 2018; Sulistyarningsih, 2021).

Kelemahan pendidikan inklusi yang selama ini terjadi lebih banyak pada komitmen pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/kota terutama terkait dengan penyediaan sumber daya, baik berupa anggaran, fasilitas dan GPK. Sistem pendidikan ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, Oleh karena itu, keterbatasan yang dimiliki menyebabkan masih banyak ABK yang tidak dapat mengikuti proses pendidikan ini. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pejabat di dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, bahwa:

“... di desa-desa banyak anak berkebutuhan khusus kategori berat yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka merasa berat ketika harus mengenyam pendidikan di SLB yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara sekolah inklusi yang ada saat ini, baru bisa melayani peserta didik berkebutuhan khusus kategori ringan. Adapun penyebabnya sekolah inklusi belum memiliki kesiapan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus kategori ABK dengan kategori berat diarahkan untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang saat ini jumlahnya baru ada empat sekolah. Disi lain, kendati sudah ada SLB, namun tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut”.

Ketika komitmen pemerintah masih rendah dalam penyediaan anggaran dan sumber daya, maka keberlangsungannya Pendidikan dan sekolah inklusi menjadi terancam, padahal masyarakat terutama bagi yang memiki anak ABK sangat membutuhkan Sekolah dan pendidikan inklusi yang mampu menjadikan anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Komitmen Pemerintah, terutama para pemimpin pada pemerintahan sangat penting karena menyediakan sumber daya untuk implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen yang berisi semua proses yang berkaitan dengan kualitas. (Javed, Samia, 2015)

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan sekolah inklusi tidak mudah, karena menyangkut dengan kepentingan yang berbeda dari individu-individu yang memiliki keterbatasan. Kebijakan tentang penyelenggaraan Sekolah/Pendidikan inklusi merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki ABK. Namun demikian, pelaksanaan Pendidikan inklusi penuh dengan tantangan yang memerlukan kekuatan dorongan untuk menghadapinya. Tantangan tersebut meliputi: *Pertama*, keberagaman anak ABK yang memerlukan penanganan secara khusus, tidak dapat dilakukan secara klasikal. Termasuk penyediaan fasilitas dan tenaga GPK. *Kedua*, Keterbatasan jumlah GPK yang ada di Kabupaten Banyumas menyebabkan pelaksanaan Pendidikan inklusi tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebenarnya GPK perlu pelatihan khusus, namun dalam pelaksanaannya mengambil dari guru regular yang dilatih dengan pelatihan khusus, namun kondisi ini menjadi kurang maksimal. *Ketiga*, masih minimnya fasilitas dan peralatan pembelajaran yang khusus disediakan untuk sekolah inklusi. Masalah ini yang menjadi salah satu sebab mengapa dari sekian banyak sekolah yang ditunjuk sebagai Sekolah inklusi, ternyata hanya sebagian kecil sekolah yang tetap berjalan dalam melayani sekolah inklusi. *Keempat*, keberagaman siswa ABK menuntut adanya keberagaman muatan dan materi pembelajaran, yang tidak dapat begitu saja disamakan dengan siswa yang regular. Perlu ada inovasi dan modifikasi dari para GPK dalam menyusun materi pembelajaran yang sesuai.

Beberapa keterbatasan yang menjadi tantangan di atas, hanya akan dapat diatasi ketika ada perhatian dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan manajemen dan tata kelola pendidikan inklusi perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2017). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Sumber Sari 1 Kota Malang. *Education and Human Development Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33086/ehdj.v1i1.290>
- Ainscow, M., T. Booth, and A. Dyson. 2006. *Improving Schools, Developing Inclusion*. London: Routledge.
- Bahri, Syaiful, (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar, Edukatif : *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 Halm 94 - 100
- Boyce, Carolyn & Palena Neale, 2006, Conducting In-Depth Interviews: A Guide For Designing And Conducting In-Depth Interviews For Evaluation Input, Pathfinder International Tool Series : *Monitoring And Evaluation* -2: https://nyhealthfoundation.org/wp-content/uploads/2019/02/m_e_tool_series_indepth_interviews-1.pdf
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen*, dan pemasaran edisi pertama. Jakarta: kencana prenada media group.
- Echeita, G., and M. Ainscow. (2011). “La educación inclusiva como derecho: Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente.” [Inclusive education as a right: framework and guidelines for action for the development of a pending revolution]. *Tejuelo* 12: 26–46.
- Echeita, G., C. Simón, C. Márquez, M. L. Fernández, A. Moreno, and E. Pérez. (2017). “Análisis y valoración del área de Educación del III Plan de Acción para Personas con Discapacidad en la Comunidad de Madrid (2012-2015).” [Analysis and assessment of the Area of Education in the III Plan of Action for People with Disability in the Autonomous Community of Madrid]. *Siglo Cero* 48 (1): 51–71.
- Edward, C., Sopandi, A., & Kasiyati, K. (2018). Pengelolaan Kelas Inklusif dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Anak Berkeasulitan Belajar. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 2(1), 53-58. diunduh dari <http://jpkk.ppj.unp.ac.id/index.php/jpkk/article/view/307>
- Fayaz, R. (2019). Inclusive Education In India: Concept, Need And Benefits. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR)*, 2(3), 71-81

- Garna, Judistirea. K (1999) *Metoda penelitian :pendekatan kualitatif* , Bandung : Primaco Akademika,
- Goggin, Malcom L, et.all. 1990. *Implementation Theory and Practice: Toward Third Generation*, Scott, Foiresman/Little, Brown Higher Education, Scott, Foresman and Company, USA
- Horton, Douglas, et. all. 2003. *Evaluating Capacity Development: Experiences From Research And Development Organizations Around The World*. The Netherlands: International Service for National Agricultural Research (ISNAR); Canada: International Development Research Centre (IDRC), the Netherlands: ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA).
- Iswari, Mega (2007). *Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Working Paper. FIP UNP, Padang.
- Javed, Samia (2015) Impact of Top Management Commitment on Quality Management, *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 5, Issue 8, August 2015
- Kemdikbud, 20010, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/07/kemendikbud-ajak-daerah-tingkatkan-pendidikan-inklusif>.
- Kementrian Pendidikan Nasional, (2008) *Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana*
- Kementrian Pendidikan Nasional, (2009), *Permendiknas No. 70 Tahun 2009*, tentang pendidikan inklusi
- Kovač, Velibor Bobo & Birgit Lene Vaala (2019): Educational inclusion and belonging: a conceptual analysis and implications for practice, *International Journal of Inclusive Education*, DOI: 10.1080/13603116.2019.1603330
- Kumorotomo, Wahyudi, 2002, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Lusthaus, Charless, et.,all, 2002. *Organizational Assessment. A framework for improving performance*. Ottawa: Inter-American Development Bank, Washington DC and International Development Research Centre
- Marlia, L. (2018). *Manajemen pendidikan inklusif di sekolah Dasar islam terpadu Annida Sokaraja Banyumas*. Thesis. <https://jurnal.untirta.ac.id>
- Maulida, E. (2019). Lesson of Inclusive Education Implementation in Jakarta: Availability and Accessibility Issues. *Education Quarterly Reviews*, 2(1), 172-184
- Mayasari, M. (2016). Implementasi Kurikulum 2013 Pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 3(1), 1-18
- Messiou, K.(2017). Research in the Field of Inclusive Education: Time for a Rethink?, *International Journal of Inclusive Education*, 21 (2): 146–159. doi:10.1080/13603116.2016.1223184.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mohammad Takdir. (2013). *Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Muntaner, J. J., M. R. Rosselló, and B. de la Iglesia. (2016). Buenas prácticas en educación inclusiva.” [Good practices in inclusive education]. *Educatio Siglo*, XXI 34 (1): 31–50. doi:10.6018/j/252521
- Nilholm, C., and K. Göransson. (2017). “=What is Meant by Inclusion? An Analysis of European and North American Journal Articles with High Impact. *European Journal of Special Needs Education*. 32 (3): 437–451. doi:10.1080/08856257.2017.1295638.
- Nurvitasari, S., Azizah, L.Z., & Sunarno, S. (2018). Konsep dan Praktik Pendidikan Inklusi di Sekolah Alam Ramadhani Kediri. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 15-22. doi:https://doi.org/10.23917/indigenous.v3i1.5743
- Peters, S. J. (2003). *Inclusive education: Achieving education for all by including those with disabilities and special education needs*. Washington, The World Bank, 26690, 1-133

- Radar Banyumas, (2019) <https://radarbanyumas.disway.id/read/13780/2019-seluruh-sekolah-di-banyumas-wajib-beri-layanan-inklusi>.
- Rahayu, S dkk. 2013 Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 10 Nomor 2.
- Rajab, A. (2018). Tugas Pokok Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SDN Surabaya. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 10(4), 1-48
- Rizqianti, N.A. dkk, (2022) Implementasi Tugas Guru Pembimbing Khusus Serta Kendala sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusi Kota Surabaya, *Jurnal Pendidikan kebutuhan Khusus*, Vol.6. No.1 2022 pp.67-75. DOI: <https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i1.609>
- Sánchez-Teruel, D., and M. A. Robles-Bello. (2013). “Inclusión como clave de una educación para todos: revisión teórica.” *REOP. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía* 24 (2): 24–36
- Sastradiharja, E. J., MS, F., & Sutarya, M. (2020). Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta. *Alim Journal of Islamic*, 1(2), 1–118
- Serayu News, (2022), <https://serayunews.com/ini-sekolah-yang-menerima-anak-berkebutuhan-khusus-di-banyumas/>) 11 Desember 2022
- Sulistyaningsih, M. (2021). *Manajemen Pendidikan Inklusi di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap*. LPP Al-Irsyad Cilacap
- Sulthon, S. (2019). Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 6(1), 151-172
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. *Humanitas*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>
- Tsang, Vicky, and Libby Cheng. (2017). A Systematic Review of Classroom Interventions to Promote Social Inclusion for Preschoolers with Special Needs in Inclusive Educational Settings. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies* 8 (2): 74–89. doi:10520/EJC-9b959587f.
- UNESCO. (2008). *Inclusive Education: the Way of the Future*. Paris: Author
- Walker, V., S. N. DeSpain, J. R. Thompson, and C. Hughes. (2014). Assessment and Planning in k-12 Schools: A Social-Ecological Approach.” *Inclusion* 2 (2): 125–139. doi:10.1352/2326-6988-2.2. 125.
- Wathoni, K. (2013). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.1.99-109>
- Zakia, D. L. (2015), November). Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi. In *Seminar Nasional Ilmu Pendidikan UNS 2015*, Sebelas Maret University.